

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

Sekretariat BPTJ

LAPORAN || 2021 TRIWULAN

Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia



<http://bptj.dephub.go.id>

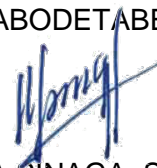
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan II Tahun 2021**" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan telah menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas Kementerian Perhubungan di bidang pengelolaan transportasi perkotaan, khususnya untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan II Tahun 2021 berisikan program dan kegiatan bidang pengelolaan transportasi perkotaan yang dilaksanakan selama triwulan II tahun 2021 sebagai bentuk implementasi konsep Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selama kurun waktu triwulan II tahun 2021. Selain itu, Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada periode berikutnya.

Jakarta, Juli 2021
SEKRETARIS
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JABODETABEK



ROSITA SINAGA, SH., MM.
NIP. 19620904 198903 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. LATAR BELAKANG.....	5
1.2. PERJANJIAN KINERJA.....	6
BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	8
2.1. CAPAIAN KINERJA.....	8
2.2. REALISASI ANGGARAN.....	14
2.3. EVALUASI CAPAIAN KINERJA	17
BAB III PENUTUP.....	18
3.1. KESIMPULAN	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hasil Survey IKM Bulan April-Juni 2021	10
Gambar 2. Penyematan Pin dan Penandatanganan Komitmen Bersama	11
Gambar 3. Pengelolaan Media Sosial BPTJ.....	13
Gambar 4. Kampanye Jalan Hijau.....	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPTJ Tahun 2021	7
Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan II Tahun 2021	8
Tabel 3. Perbandingan hasil identifikasi tahun 2020 dan tahun 2021	12
Tabel 4. Hasil Survey Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ	14
Tabel 5. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK Triwulan II Tahun 2021	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek merupakan unit kerja penunjang Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ. Pelaksanaan tugas Sekretariat BPTJ dalam rangka memenuhi fungsinya untuk (1) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara, serta evaluasi dan pelaporan; (2) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan, penyusunan perjanjian dan kerjasama antar lembaga, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum; (3) Penyiapan pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum; dan (4) Penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, komunikasi dan informasi publik, edukasi, publikasi dan dokumentasi, serta pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pembentukan Sekretariat BPTJ merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang telah ditetapkan pada tanggal 27 November 2018. Pembentukan Organisasi ini selanjutnya diikuti dengan penetapan Peta Jabatan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dimana Sekretariat memiliki 4 (empat) unit kerja Eselon III yang terdiri dari Bagian Perencanaan dan keuangan, Bagian Kepegawaian dan Umum, Bagian Hukum, dan Bagian Hubungan Masyarakat.

Dengan ditetapkannya PM 110 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan kepada BPTJ dalam mengelola penyelenggaraan transportasi Jabodetabek, maka perlu dilakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan lainnya terkait penyelenggaraan transportasi Jabodetabek, salah satunya dengan mencabut PM 66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan kepada Kepala BPTJ, sehingga kewenangan pengelolaan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi mutlak ada di BPTJ. Hal ini didukung dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan II Tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPTJ sangat

didukung oleh kinerja unit kerja Eselon III di lingkungan BPTJ.

Pada tahun 2020, Sekretariat BPTJ melakukan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang memberikan arah kebijakan serta pedoman dalam memetakan prioritas-prioritas pembangunan untuk mencapai indikator kinerja utama BPTJ, yaitu mewujudkan transportasi terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Renstra Sekretariat BPTJ dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta pengukuran kinerja, kinerja anggaran, dan kinerja organisasi Sekretariat BPTJ.

Sekretariat BPTJ pada tahun 2021 memiliki delapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang berorientasi *outcome* dan merupakan *core business* yang menjadi dasar analisis capaian kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan II Tahun 2021. Hal ini merupakan tindak lanjut hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Area Akuntabilitas oleh Kemenpan RB yang mengamanatkan bahwa indikator kinerja harus berorientasi *outcome* dan merupakan *core business* dari BPTJ

Selanjutnya, Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan II Tahun 2021 berisikan program dan kegiatan bidang pengelolaan transportasi perkotaan yang dilaksanakan selama triwulan II tahun 2021 sebagai bentuk implementasi konsep Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target IKK yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh BPTJ selama kurun waktu triwulan II tahun 2021. Selain itu, Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada periode berikutnya.

1.2. PERJANJIAN KINERJA

Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk tahun 2021 telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun secara berjenjang mengacu pada konsep Renstra BPTJ Tahun 2020-2024. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Pejabat Eselon IV dengan Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon II dengan Eselon I.

Sasaran program Sekretariat BPTJ merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome* dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPTJ, serta capaian dan permasalahan yang dihadapi oleh BPTJ pada periode sebelumnya. Selanjutnya, dari satu Indikator Kinerja Program (IKP) dijabarkan menjadi delapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPTJ Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
SK9 Meningkatnya Birokrasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKK18 Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	86
	IKK19 Indeks Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	3,15
	IKK20 Indeks Reformasi Hukum Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	73
SK10 Meningkatnya Kapailitas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKK21 Indeks Pengawasan Kearsipan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	1
	IKK22 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	75
	IKK23 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	87
SK11 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKK24 Indeks Pelayanan Publik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	3,5
SK12 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKK25 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	%	75

BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

2.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Indikator Kinerja Program Sekretariat BPTJ. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran program yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat BPTJ Tahun 2021 dapat tercapai.

Berdasarkan penetapan target pada setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPTJ, berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPTJ pada triwulan II tahun 2021:

Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK 2021	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian
IKK18 Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	86	85	78,04	91,81%
IKK19 Indeks Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	3,15	3,15	3,13	99,36%
IKK20 Indeks Reformasi Hukum Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	73	72	72	100%
IKK21 Indeks Pengawasan Kearsipan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	1	1	1	100%
IKK22 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	75	75	0	0%

IKK23 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	87	85	90,83	106%
IKK24 Indeks Pelayanan Publik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	3,5	3,45	3.35	77%
IKK25 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	%	75	75	0	0%

2.1.1. IKK18 Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Nilai SAKIP BPTJ diperoleh dari hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada 9 (sembilan) unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dari hasil evaluasi, BPTJ memperoleh nilai 78,04 dengan predikat BB.

2.1.2. IKK19 Indeks Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Indeks Maturitas SPIP diperoleh dari hasil penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam rangka mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit organisasi Kementerian Perhubungan. Dari hasil penilaian tersebut, berdasarkan modus dari seluruh Eselon II, BPTJ mendapatkan skor 3,133 dengan tingkat maturitas "Terdefinisi."

2.1.3. IKK20 Indeks Reformasi Hukum Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Reformasi hukum yang dimaksud dalam IKK20 adalah deregulasi peraturan-peraturan di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Deregulasi peraturan merupakan proses pencabutan, penyederhanaan, atau perbaikan terhadap peraturan-peraturan, khususnya di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Ruang lingkup peraturan yang dideregulasi meliputi Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan, Peraturan Kepala BPTJ, dan Keputusan Kepala BPTJ. Nilai terbaru Indeks Reformasi Hukum BPTJ masih menggunakan nilai tahun 2020 sebesar 72.

2.1.4. IKK21 Indeks Pengawasan Kearsipan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Penilaian Pengawasan Kearsipan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada saat ini sedang dalam tahap penilaian oleh Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang dimana penilaian tersebut diakumulasi dengan semua unit kerja Eselon I dan akan dinilai oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada akhir tahun 2021 ini

2.1.5. IKK22 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Sementara hingga triwulan 2, Indeks Tata Kelola Manajemen ASN masih belum diketahui datanya karena masih menunggu penyelesaian pengisian kuesioner.

2.1.6. IKK23 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ dihitung dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, sehingga didapatkan:

$$\text{Indeks Pengelolaan Keuangan} = (60\% \times NKA) + (40\% \times NPA)$$

dimana:

NKA : Nilai Kinerja Anggaran

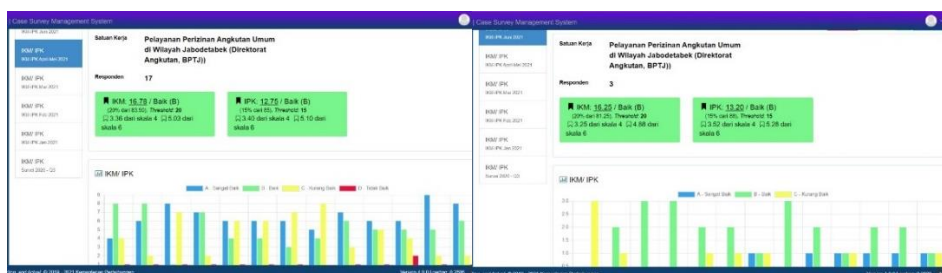
NPA : Nilai Pelaksanaan Anggaran

Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ yang terbaru adalah nilai pada tahun 2020 yakni sebesar 90,83

2.1.7. IKK24 Indeks Pelayanan Publik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Indeks Pelayanan Publik (IPP) BPTJ dinilai berdasarkan 6 aspek pada Triwulan II Tahun 2021 dengan beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu:

Kebijakan Pelayanan. Telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat pada 4 terminal di wilayah pengelolaan BPTJ yaitu Baranangsiang, Jatijajar, Poris Plawad dan Pondok Cabe. Dari hasil survey menunjukkan bahwa IKM BPTJ pada bulan April-Juni menunjukkan hasil yang baik (B).



Gambar 1. Hasil Survey IKM Bulan April-Juni 2021

Profesionalisme SDM. Telah dilakukan kegiatan penyematan PIN dan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kegiatan dimaksud bertujuan untuk memberikan dukungan dan komitmen pimpinan dalam pengusulan 4 Satuan Pelayanan Terminal BPTJ sebagai nominator WBK. Selain itu juga telah dilaksanakan pembahasan bersama dengan para tim penilai mengenai pelaksanaan kegiatan pemberian Penghargaan Masinis, Pramudi Teladan dan Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek Tahun 2021 pada hari Selasa, 15 Juni 2021. Pemberian penghargaan dimaksud dilaksanakan dengan tujuan memberikan apresiasi kepada para pramudi dan operator yang telah berkontribusi dan berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama pada masa pandemi.



Gambar 2. Penyematan Pin dan Penandatanganan Komitmen Bersama

Sarana Prasarana. Ketersediaan parkir, ruang tunggu, toilet, kantin, dan *front office* telah disediakan sejak awal BPTJ berdiri. Berkaitan dengan pandemi, BPTJ telah menggunakan perangkat 18 Genose di Terminal Poris Plawad sebagai upaya mencegah penyebaran virus pada area terbuka di terminal.

Sistem Informasi Pelayanan Publik. Pada 4 (empat) terminal BPTJ, telah tersedia sistem informasi pelayanan publik berupa penyediaan pengaduan layanan informasi dan di triwulan II telah dilaksanakan monitoring serta evaluasi layanan JR Connexion yang dilaksanakan pada 4 titik penting di wilayah Jabodetabek. Hasil evaluasi dimaksud telah disampaikan pada triwulan II tahun 2021 kepada direktorat teknis terkait.

Selain itu, sebagai bentuk pelayanan informasi publik kepada masyarakat, juga telah dilakukan pembahasan bersama tenaga ahli teknologi informasi dan konten untuk mengembangkan website BPTJ.

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan informasi kepada publik, juga telah dilakukan pemutakhiran daftar informasi publik (DIP) pada terminal tipe A di bawah pengelolaan BPTJ terkait pelaksanaan PPID. Pelaksanaan monitoring pada tahun ini merupakan monitoring kedua kalinya setelah pelaksanaan PPID tahun 2020. Perbandingan hasil identifikasi tahun 2020 dan tahun 2021 dijelaskan dalam tabel di bawah

Tabel 3. Perbandingan hasil identifikasi tahun 2020 dan tahun 2021

No	Hasil Monitoring	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Ketersediaan standar layanan informasi PPID	belum memenuhi standar aspek layanan informasi	belum memenuhi standar aspek layanan informasi
2.	Ketersediaan Daftar Informasi Publik (DIP)	daftar informasi publik pada semua terminal belum tersedia dengan baik	daftar informasi publik pada semua terminal belum tersedia dengan baik
3.	SDM	SDM dalam memberikan layanan informasi publik masih kurang	SDM dalam memberikan layanan informasi publik masih kurang

Sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan publikasi (non pemberitaan) beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah placement Berita Trans, pembuatan spanduk dan banner terkait sosialisasi dan edukasi larangan untuk tidak mudik, produksi dan penayangan filler, pelaksanaan webinar, produksi SMS blast terkait pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H, talkshow radio di Jabodetabek terkait kebijakan pengendalian transportasi di wilayah Jabodetabek selama masa Idul Fitri 1442 H, pembuatan materi benda pameran terkait pameran Dubai Expo Tahun 2020 dan pembuatan video Zona Integritas pada 4 terminal BPTJ.

Guna mendukung operasional pelayanan publik, telah disusun dokumentasi berupa pembuatan video greeting Idul Fitri 1442 H, video sosialisasi kebijakan pengendalian transportasi selama masa pandemic dan pembuatan video bijak bermobilitas pada Kawasan aglomerasi di Wilayah Jabodetabek.

Konsultasi dan pengaduan. Selama triwulan ke-dua telah dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan konsultasi dan pengaduan. Pada periode ini, monitoring pemberitaan dan opini publik telah dilaksanakan sejak bulan April 2021 sampai dengan Juni 2021. Hasil analisis dari monitoring tersebut digunakan sebagai pedoman untuk melihat dan mengetahui sentimen publik terhadap isu yang menyangkut kebijakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek maupun sektor transportasi Jabodetabek.

Pada triwulan I ini juga terus diupayakan layanan konsultasi dan pengaduan baik melalui CC 151 maupun melalui seluruh kanal resmi media sosial BPTJ. Seluruh aduan yang masuk telah ditanggapi dan atau ditindaklanjuti sesuai SOP yang telah dibuat. Pengelolaan konten media sosial juga telah dilaksanakan pada triwulan ke-2 2021 sejak April sampai dengan Juni 2021. Penyusunan konten media sosial menjadi salah satu upaya pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di era digital. Selain melalui pembuatan konten media sosial, telah dilaksanakan pula diseminasi digital melalui kampanye "Apresiasi Pelaksanaan Protokol Kesehatan di

Transportasi Umum" yang melibatkan para pegiat media sosial. Diharapkan melalui kampanye berbasis digital ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan di transportasi umum.



Gambar 3. Pengelolaan Media Sosial BPTJ

Guna menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan di transportasi Umum, BPTJ bekerjasama dengan Ombudsman RI dan YLKI juga telah melaksanakan monitoring implementasi protokol kesehatan pada layanan angkutan umum massal. Hasil dari monitoring ini pun turut dipublikasikan melalui kegiatan Jumpa Pers bertajuk “Implementasi Monitoring Implementasi Protokol Kesehatan pada Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan.”

Inovasi. BPTJ telah melakukan inovasi berupa pelaksanaan kegiatan Kampanye Jalan Hijau yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik pada tahapan first and last mile. Pelaksanaan kampanye tahun ketiga kali ini dilaksanakan pada Bulan April dengan focus pada pemberian penghargaan kepada stakeholder yang konsisten dalam memberikan layanan transportasi ramah lingkungan berupa penyediaan jalur pejalan kaki dan bagasi sepeda gratis pada layanan JR Connexion, Untuk mendukung hal tersebut, telah dilaksanakan persiapan virtual event Kampanye Jalan Hijau berupa breakfast meeting dengan mengundang para pemerintah daerah dan setaholder serta pelaksanaan virtual event Kampanye Jalan Hijau. Kampanye Jalan Hijau pada tahun 2021 bekerjasama dengan Kemenkes sebagai bagian menggaungkan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)



Gambar 4. Kampanye Jalan Hijau

2.1.8. IKK25 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Berkaitan dengan Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, pada saat ini telah dilaksanakan pengisian kuesioner kepada seluruh pegawai di lingkungan BPTJ berkaitan dengan Penilaian Penyelenggaraan Perkantoran. Adapun hasil penilaian dari kuesioner tersebut yaitu:

Tabel 4. Hasil Survey Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ

No	Uraian Kegiatan	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	Target	Prosentase Capaian	Capaian Akhir
1	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	9,7%	33,5%	44,9%	11,9%	100	100%	64,8
	Penilaian Responden	25	50	75	100			
	Jumlah Capaian	2,4	16,8	33,7	11,9			

2.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Sekretariat BPTJ berdasarkan pagu awal tahun 2021 adalah sebesar Rp.86.164.007.000. Namun terdapat perubahan karena adanya refocusing anggaran sebagaimana tercantum dalam DIPA revisi 2 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.91.064.396.000. Pada triwulan II 2021, anggaran Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah terealisasi sebesar Rp.18.346.140.836.

Kecilnya persentase penyerapan anggaran BPTJ tahun 2021 sampai dengan triwulan II disebabkan pagu besar kegiatan kontraktual yang masih dalam proses lelang dan belum terlaksana. Pagu anggaran, realisasi, dan sisa anggaran per Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK Triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian
IKK18 Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	7.208.345.000	3.604.172.500	452.457.292	12,55%
IKK19 Indeks Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	500.000.000	250.000.000	11.104.500	4,44%
IKK20 Indeks Reformasi Hukum Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	2.622.356.000	1.311.178.000	467.416.943	35,65%
IKK21 Indeks Pengawasan Kearsipan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	976.930.000	488.465.000	300.000	0,06%
IKK22 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	7.226.770.000	3.613.385.000	1.147.295.421	31,75%
IKK23 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	3.176.753.000	1.588.376.500	445.487.384	28,05%
IKK24 Indeks Pelayanan Publik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	5.965.750.000	2.982.875.000	944.455.303	31,66%
IKK25 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	63.387.492.000	31.693.746.000	14.877.623.993	46,94%

Sampai dengan triwulan II tahun 2021 sudah ada realisasi anggaran yang mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Sekreariat Badan Pengelola

Transportasi Jabodetabek. Realisasi anggaran tersebut diperuntukkan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. IKK18 meliputi kegiatan:
 - Rapat persiapan penghitungan capaian kinerja triwulan II BPTJ Tahun 2021;
 - Rapat penyusunan revisi PK BPTJ Tahun 2021;
 - Rapat pemenuhan data dukung evaluasi SAKIP;
 - Bimbingan teknis tata cara penginputan aplikasi E-Performance, E-Monev, dan SMART.
2. IKK20 meliputi kegiatan:
 - Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Penyiapan bahan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Reforasi Birokrasi Tahun 2021;
 - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Teknis Terkait Bidang Transportasi;
 - Kegiatan Kerjasama di Bidang Transportasi;
 - Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum.
3. IKK21 meliputi kegiatan:
 - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas di Lingkungan BPTJ;
 - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kearsipan di Lingkungan BPTJ;
4. IKK22 meliputi kegiatan:
 - Pelaksanaan kegiatan monitoring CPNS selama pelaksanaan orientasi;
 - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Terminal Penumpang yang dikelola oleh BPTJ;
 - Kegiatan Pembangunan Kapasitas SDM BPTJ (3 tahap);
 - Kegiatan pembahasan kelembagaan BPTJ;
 - Pelaksanaan test TOEFL ITP;
 - Kegiatan pemutakhiran SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);
 - Kegiatan monitoring Survey Kepuasan Masyarakat dalam rangka persiapan Zona Integritas;
 - Kegiatan penyusunan SKP pegawai.
5. IKK25 meliputi kegiatan:
 - Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Layanan Perkantoran seperti kegiatan pengadaan ATK, pengadaan vitamin, dan Kegiatan Penanganan Pandemi Covid 19 bagi Pegawai di BPTJ;
 - Kegiatan Pengadaan Peralatan Fasilitas dan Mesin Perkantoran.

Realisasi anggaran Sekretariat BPTJ pada triwulan II tahun 2021 masih terbilang relatif kecil, bahkan IKK19 Indeks Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek hanya menyerap dua persen dari target. Hal tersebut terjadi karena diundangkannya peraturan baru yaitu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yang

mengubah tata cara penilaian mandiri nilai maturitas SPIP di lingkungan kementerian/lembaga/daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, sampai dengan Triwulan II kegiatan yang dilakukan baru berupa koordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan BPKP terkait pelaksanaan SPIP Terintegrasi yang baru.

2.3. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Dengan memperhatikan capaian kinerja, dapat dikatakan bahwa capaian Sekretariat BPTJ pada triwulan II tahun 2021 dapat dikatakan baik dilihat dari nilai rata-rata capaian yang sudah memenuhi dan mendekati target. Namun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang nilainya masih menggunakan nilai capaian tahun lalu karena penilaian tersebut bersifat tahunan dan tidak dapat dilakukan sendiri oleh Sekretariat BPTJ. Hal tersebut seperti indikator nilai SAKIP yang nilainya didapat dari tim evaluator Inspektorat Jenderal, indikator nilai maturitas SPIP yang nilainya didapat dari hasil penilaian BPKP, dan indeks lain yang penilaiannya bersifat tahunan seperti yang telah dijelaskan pada poin yang bersangkutan.

Namun meski demikian, nilai realisasi anggaran BPTJ masih terbilang rendah dengan rata-rata realisasi sebesar 23,89%. Hal ini juga tak lepas dari pandemi Covid-19 yang masih parah hingga menyebabkan banyak kegiatan Sekretariat BPTJ yang dibatasi dan bahkan dibatalkan.

BAB III PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

1. Kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan II Tahun 2021 berdasarkan target capaian pada Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sudah cukup baik dengan rata-rata capaian sebesar 71,77%;
2. Meskipun kegiatan-kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan sudah terlaksana, namun realisasi anggaran Sekretariat BPTJ sampai dengan triwulan II tahun 2021 juga masih kecil, hanya sebesar 23,89%;

3.2. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dari analisis dan permasalahan telah teridentifikasi untuk triwulan II tahun 2021, berikut beberapa saran yang diberikan agar capaian kinerja BPTJ dapat meningkat pada triwulan III dan seterusnya:

1. Sekretariat BPTJ agar dapat melakukan administrasi terhadap nilai Indikator Kinerja Kegiatan yang nilainya berasal dari pihak eksternal apabila sudah dilakukan penilaian.
2. Mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan pagu yang tersedia dengan merealisasikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.

